

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
PERKARA KORUPSI DANA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) PERUBAHAN 2003
KOTA SURAKARTA**

TESIS

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Magister S2
Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi
pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta**



**Oleh :
Anjar Lea Mukti Sabrina
NIM : S.331202001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013**

commit to user

RINGKASAN TESIS :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta yang seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dan upaya yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi hambatan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi para terpidana korupsi yang tidak mampu melunasi sisa pembayaran uang pengganti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau non doktrinal (*socio legal research*). Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat *deskriptif* dan bentuk penelitian ini merupakan penelitian *evaluatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan komponen reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

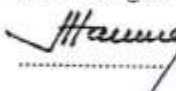
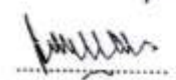
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap para terpidana korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta, karena Jaksa masih menggunakan paradigma lama dalam sistem pembuktian yaitu dengan menggunakan pendekatan *Follow The Suspect* (mengikuti tersangka). Kedua, bahwa upaya yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi problematika hambatan eksekusi pembayaran uang pengganti para terpidana korupsi adalah dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pengembalian keuangan negara. Karena dalam undang-undang tersebut dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik dan menggunakan pendekatan *Follow The Money* (menelusuri aliran uang).

commit to user

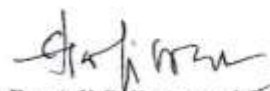
**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) PERUBAHAN 2003 KOTA SURAKARTA**

**DISUSUN OLEH :
Anjar Lea Mukti Sabrina
NIM : S.331202001**

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :
Dewan Pembimbing**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing	: <u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19570203 198503 2 001		17/12-2013
Co. Pembimbing:	<u>Bambang Santoso, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19620209 198903 1 001		13/12-2013


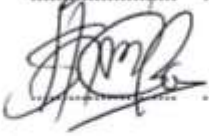


Mengetahui,
Ketua Program
Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.
NIP. 19630209 198803 1 003



**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI DANA
ANGGARAN PENDAFTARAN BELANJA DAERAH
(APBD) PERUBAHAN 2003 KOTA SURAKARTA**

DISUSUN OLEH :
Anjar Len Mukti Sabrina
NIM : S.331202001

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Prof. Dr. Adi Sulistivono, S.H., M.H.</u> NIP. 19630209 198803 1 003		17/12-13
Sekretaris	<u>Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196901107 198601 1 001		17/12-13
Anggota	<u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19570205 198503 2 001		17/12-13
	<u>Bambang Santoso, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19620209 198903 1 001		18/12-2013

Mengetahui,

 Direktur Program
Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, S.H., M.S.
NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program
Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistivono, S.H., M.H.
NIP. 19630209 198803 1 003

PERNYATAAN

Nama : Anjar Lea Mukti Sabrina
NIM : S.331202001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **PROBLEMATIKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERUBAHAN 2003 KOTA SURAKARTA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda *foot note* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipublikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 10 Desember 2013

Yang membuat pernyataan

Anjar Lea Mukti Sabrina

NIM. S331202001

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Alam Nasyrah (94): 6).

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Q.S Ad-Ra’d (13): 11).

“Dunia ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak untuk kerakusannya” (Mahatma Gandhi).

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui dan anda tidak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu” (William Feather).

“I hated every minute of training, but I said, Don't quit! Suffer now and live the rest of your life as a champion”. (Muhammad Ali)

“Hati nurani yang bersih tidak takut dakwaan atau fitnah” (Penulis).

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- ⊙ Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- ⊙ Alm. Ayah yang sudah menghadap kepada Allah SWT. Semoga memperoleh ketenangan dan tempat terbaik di sisi-Nya.
- ⊙ Ibu tercinta yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Magister Hukum.
- ⊙ Teman-temanku yang telah memberi warna kehidupan selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan.
- ⊙ Almamater.
- ⊙ Diriku sendiri.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PROBLEMATIKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERUBAHAN 2003 KOTA SURAKARTA”** ini dapat peneliti selesaikan tepat waktu guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat magister program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Kasidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, S.H., M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah program magister di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan pembimbing tesis yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

commit to user

Maret Surakarta dan telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan tesis.

4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi Program Magister Ilmu Hukum guna mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan tesis.
5. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menentukan dosen pembimbing bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir (tesis).
6. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi dan tesis yang selama ini telah dengan sabar dan tekun memberikan arahan dan bimbingan dari awal penulisan laporan penelitian tesis ini dan telah membimbing, berdiskusi, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian tesis ini serta menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas.
8. Staff Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (Mas Rino, Mas Topik, Mbak Lely, Mbak Dyah) yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi, keuangan, jadwal perkuliahan dan prosedur-prosedur penyusunan tesis mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pelaksanaan ujian tesis.
9. Ibu Yuyu Ayomsari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data guna menunjang penulisan tesis ini.

10. Bapak Sanadji, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data guna menunjang penulisan tesis ini.
11. Kepala Seksi Pidana Khusus, Erfan Suprpto, S.H. beserta Staff dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Chandra Eka Yustisia, S.H. beserta Staff di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian, memperoleh data-data, dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini.
12. Kepala Seksi Pidana Khusus, Syahrir Sagir, S.H. beserta Staff dan segenap teman-teman Alm. Ayah yang masih berkarir di Kejaksaan Negeri Ngawi yang telah banyak membantu penulis dalam berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini.
13. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2012 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan teman-teman kelas Hukum Pidana Ekonomi, terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan kekeluargaan yang indah selama ini.
14. Untuk semua guru-guruku di MI Al-Falah Beran, Ngawi; SLTP Negeri 5 Ngawi; dan SMA Negeri 1 Ngawi yang telah mengajar, membagi ilmunya dan mengantar penulis hingga memperoleh gelar magister. Tanpa mereka mungkin penulis tidak bisa meraih cita-cita.
15. Teman-temanku penghuni Wisma Putri Kusumawati (KW's Family) dan Kost Tikara. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.
16. Pak Fud dan Mas Danang yang sudah penulis anggap sebagai ayah dan kakak sendiri. Terima kasih atas do'a, nasehat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis disaat penulis sedang terpuruk.
17. Tesis ini tidak hanya penulis dedikasikan kepada setiap orang yang telah memberi inspirasi bagi penulis tetapi juga untuk seseorang yang akan mengisi hidup penulis kelak dikemudian hari.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

commit to user

Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi khalayak akademika civitas hukum serta berbagai pihak yang membutuhkannya. Tiada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Surakarta, 10 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	12
a. Hal Menjalankan Eksekusi.....	12
b. Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti.....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	24
b. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia.....	33
3. Tinjauan Umum Tentang Teori Penegakan Dan Bekerjanya Hukum.....	37
a) Teori Penegakan Hukum.....	37
b) Teori Bekerjanya/ Efektivitas Hukum.....	41
4. Penelitian Yang Relevan.....	44
B. Kerangka Berpikir.....	47

BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Dan Bentuk Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jenis Dan Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Implikasi.....	113
C. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Anjar Lea Mukti Sabrina, S.331202001. 2013. PROBLEMATIKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERUBAHAN 2003 KOTA SURAKARTA. Tesis : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta yang seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dan upaya yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi hambatan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi para terpidana korupsi yang tidak mampu melunasi sisa pembayaran uang pengganti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau non doktrinal (*socio legal research*). Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat *deskriptif* dan bentuk penelitian ini merupakan penelitian *evaluatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan komponen reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap para terpidana korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta, karena Jaksa masih menggunakan paradigma lama dalam sistem pembuktian yaitu dengan menggunakan pendekatan *Follow The Suspect* (mengikuti tersangka). Kedua, bahwa upaya yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi problematika hambatan eksekusi pembayaran uang pengganti para terpidana korupsi adalah dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pengembalian keuangan negara. Karena dalam undang-undang tersebut dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik dan menggunakan pendekatan *Follow The Money* (menelusuri aliran uang).

Kata kunci: Eksekusi, Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Anjar Lea Mukti Sabrina, S.331202001. 2013. THE PROBLEMS EXECUTION CRIMINAL ADDITIONAL PAYMENT COMPENSATION OF FUND CORRUPTION CASE LOCAL AN INVESTMENT BUDGET AMENDMENT OF 2003 SURAKARTA CITY. Thesis: Post Graduate Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This research aims to determine the conditions of the problems execution criminal additional payment compensation of fund corruption case local an investment budget amendment of 2003 surakarta city are often faced with many obstacles in this implementation, and efforts should be taken by Surakarta District Attorney in overcoming obstacles execution criminal additional payment compensation for the fund corruption convicts local an investment budget amendment of 2003 surakarta city who are unable to pay the remaining of the payment compensation.

This research is empirical or non doctrinal research (socio legal research). Judging from the nature of this study include legal research is descriptive and this research is a form of evaluative research. This study used a qualitative approach. The data used in this study is primary data and secondary data, secondary data consists of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. Data collection techniques with interviews and literature study. Techniques of data analysis in this study used qualitative analysis with component data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the results of research and discussion of the resulting conclusion that the firstly, obstacles faced in implementing the Surakarta District Attorney executions criminal additional payment compensation of fund corruption case local an investment budget amendment of 2003 surakarta city, because the prosecutors are still using the old paradigm of proof systems by using approaches Follow The Suspect. Secondly, the efforts must be taken by the Surakarta District Attorney in overcoming obstacles problematic execution of the payment of compensation convicted of corruption is to use the Law 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering in the country's financial recovery effort. Because in the law to permit reverse authentication systems and approaches Follow The Money.

Key words: Execution, Payment of Compensation, Corruption.